



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 04 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

Lampiran : 2 (dua).

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2007 tanggal 20 Maret 2007 perihal Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Uang Makan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil.
2. Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut hadir pada hari kerja.
3. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji dan ditandatangani Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima Pegawai Negeri Sipil.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan PNS telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.

BAB II
PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Bagian Kesatu
Pemberian Uang Makan
Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan diberikan uang makan.

Pasal 3

- (1) Uang Makan diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan Uang Makan sesuai jumlah kehadiran dalam 1 (satu) bulan dengan pemberian paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja.
- (3) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan Uang Makan sesuai jumlah kehadiran pada bulan berkenaan.

Pasal/4

Pasal 4

- (1) Uang Makan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setiap hari kerja dalam bentuk uang terhutang mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Besaran uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Golongan I dan Golongan II sebesar Rp. 55.000;
 - b. Golongan III sebesar Rp. 58.000; dan
 - c. Golongan IV sebesar Rp. 65.000.

Pasal 5

Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :

- a. tidak hadir kerja;
- b. sedang menjalankan perjalanan dinas;
- c. sedang menjalani cuti;
- d. sedang menjalani tugas belajar; dan
- e. sebab-sebab lain yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tidak hadir kerja.

Pasal 6

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi diluar satuan kerja induknya, Uang Makan dibayarkan oleh satuan kerja tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.

Bagian Kedua

Prosedur dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan

Pasal 7

- (1) Pembayaran Uang Makan didasarkan pada daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Uang Makan dibayarkan sekali, paling cepat pada awal bulan berikutnya.
- (3) Khusus untuk Uang Makan bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (4) Pembayaran Uang Makan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dan ditujukan ke rekening bendahara pengeluaran atau rekening masing-masing PNS penerima uang makan.
- (5) Apabila pagu anggaran untuk Uang Makan tersebut tidak disediakan/tidak cukup tersebut pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), Satuan Kerja dapat merevisi alokasi dana yang tersedia diluar belanja pegawai untuk alokasi dana uang makan pada DPA berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Permintaan pembayaran Uang Makan dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus.
- (7) Pembayaran Uang Makan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah Uang Makan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II dikenakan PPh sebesar 0% (nol perseratus);
 - b. Pegawai Negeri Sipil Golongan III dikenakan PPh sebesar 5% (lima perseratus); dan
 - c. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dikenakan PPh sebesar 15% (lima belas perseratus).

- (8) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Uang Makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Makan dilengkapi dengan :
- Daftar Perhitungan Uang Makan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - Daftar Hadir Kerja;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
 - SSP PPh Pasal 21.
- (9) SPM-LS Uang Makan dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (10) SPM-LS Uang Makan diajukan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Papua untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan:
- Daftar Perhitungan Uang Makan;
 - Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak; dan
 - SSP PPh Pasal 21.

BAB III
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal



GUBERNUR PAPUA, *le*

lukas enembe
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua

Nomor : 04.

Tanggal : 09. Januari 2017

DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN

SATUAN KERJA
BULAN

NO	N A M A	GOLONGAN	KEHADIRAN HARI KERJA	TARIF UANG MAKAN	JUMLAH KOTOR (4 X 5)	PPh. 21	JUMLAH BERSIH (6 - 7)	TANDA TANGAN NO REK
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mengetahui
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen

Jayapura,

Bendahara Pengeluaran

Pembuat Daftar Gaji

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Nama
NIP.



LUKAS ENEMBE, SIP, MH

LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Lampiran II: Peraturan Gubernur Papua
Nomor : DA-
Tanggal : 09. Januari 2017

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Uang Makan bulan..... bagi satuan kerja.....telah dihitung dengan benar berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Jayapura,
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen

Nama
NIP.

